

**TINGKAT KINERJA PEMIMPIN APARATUR PEMERINTAHAN
DALAM RANGKA PENGAWASAN TRANSPORTASI BERBASIS
ONLINE DI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH :

KHUMALA MUFLIHANA
NPM : 1603100041

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : KHUMALA MUFLIHANA
NPM : 1603100041
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Rabu, 11-Maret 2020
Waktu : 07.30 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si (.....)
PENGUJI II : Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si (.....)
PENGUJI III : Drs. R. KUSNADI, M.AP (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.L.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : KHUMALA MUFLIHANA
NPM : 1603100041
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : TINGKAT KINERJA PEMIMPIN APARATUR PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PENGAWASAN TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 11 Maret 2020

PEMBIMBING

Drs. R. KUSNADI, M.AP

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI

NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

PERNYATAAN



Dengan ini saya, KHUMALA MUFLIHANA, NPM 1603100041, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2020
Yang Menyatakan



KHUMALA MUFLIHANA
NPM. 1603100041

ABSTRAK

TINGKAT KINERJA PEMIMPIN APARATUR PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PENGAWASAN TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KHUMALA MUFLIHANA
NPM: 1603100041

Penelitian ini didasarkan pada belum maksimalnya dalam pengawasan transportasi berbasis online hal ini terlihat masih banyaknya Driver transportasi berbasis online yang tidak mengikuti standar serta aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja pemimpin aparatur pemerintah dalam rangka pengawasan transportasi berbasis online di dinas perhubungan provinsi sumatera utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui wawancara dan observasi dokumentasi. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah: a) adanya laporan akuntabilitas Aparatur Pemerintah/Pejabat Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan kepada pejabat pengawas. b) adanya kualitas kerja Aparatur Pemerintah/ Pejabat Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan kepada petugas pengawas transportasi berbasis Online. c) adanya disiplin kerja yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah/Pejabat Pemerintah dalam menjalankan tugas pengawasan. d) adanya prestasi kerja yang dicapai oleh Aparatur Pemerintah/Pejabat Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan kepada petugas pengawas transportasi berbasis online.

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kinerja pemimpin Aparatur Pemerintahan/Pejabat Pemerintah dalam rangka pengawasan transportasi berbasis online sudah berjalan walaupun belum sepenuhnya maksimal, dari keempat kategorisasi diatas ada dua yang sudah berjalan yaitu: 1) tanggungjawab seperti tetap melakukan kontrol kepada para petugas pengawas transportasi berbasis Online dan para petugas juga diberikan arahan untuk selalu memberi laporan yang ada dilapangan agar Pejabat Pemerintah tetap tahu hasil pekerjaan yang ada dilapangan. 2) disiplin kerja yaitu ketika menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga hasil kerja yang dihasilkan akan bersifat efektif dan efisien. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja pemimpin Aparatur Pemerintah/Pejabat Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan transportasi berbasis online sudah cukup optimal.

Kata Kunci: Kinerja, Kepemimpinan, Pengawasan transportasi berbasis online

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW. yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis membuat skripsi ini berjudul “Kinerja Kepemimpinan Aparatur Pemerintah dalam Pengawasan Transportasi Berbasis Online di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara”.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca yang nantinya dapat berguna untuk menyempurnakan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada nama yang ada dibawah ini:

1. Kepada yang tercinta, Ayahanda Penulis Hamler Siregar dan Ibunda Supiani yang selalu memberikan kekuatan untuk menjalani semua proses ini dan selalu memberikan dukungan, nasihat, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. BapakDr. Agussani M.AP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. BapakDr. Arifin Saleh, S.Sos,M.SP,selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
5. Bapak Drs.R.Kusnadi.,M.Ap selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ir. Abdul Haris Lubis.,M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
8. Buat Staf pegawai yang ada di Kantor DinasPerhubungan Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Kakak Khumala Herliana, Khumala Dwiwana S.Pd , Khumala Idayana S.Pd, Babang Khumala Ruhikmad S.Pdan Abang IparSuheri, Taufikserta adik-adik Khumala IzharidanKhumala Afriansyahyang saya sayangi terimakasih telah mensupport saya dalam menyelesaikan perkuliahan.dan ponaan Putri Indah Sari dan Amanda Khumaira yang selalu menghibur dikala saya lelah dengan tingkah lucu mereka.

10. Teman yang selalu menyemangati saya Kawa Rizmie, Suryanto, Dwi Gusnaldi, Hasriyan Syahputraserta abang Haidir Ali Sipahutarsemoga kalian cepat nyusul.
11. Squed tersayang Darathul Laila S.Ap, Dhea Gusmitha Rianti S.Ap, dan Fitri Ramadani S. Apteman seperjuangan selama kuliah, melewati suka duka, selalu mendengar keluh-kesah dan selalu mensupport disaat banyak masalah. Dan terimakasih juga untuk Yuri Agustiani S. Apteman satu pembimbing pernah nangis bareng-bareng karena skripsi. Heheh..
12. Teman dari zaman gak enak sampe sekarang Lastri, Wani, Azlin, dan Uli yang sudah memberi semangat dan semoga kita menjadi orang sukses.

Selanjutnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyusun skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan menjadi baik kedepannya.

Medan, Maret 2019

Penulis

Khumala Muflihana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Pembatas Masalah	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS.....	7
2.1 Kinerja Kepemimpinan Aparatur Pemerintah	6
2.1.1 Pengertian Kinerja.....	6
2.1.2 Tujuan Kinerja	8
2.1.3 Sasaran Kinerja	9
2.1.4 Pengukuran Kinerja	9
2.1.5 Pengertian Kepemimpinan.....	11
2.1.6 Pengertian Aparatur Pemerintah	16
2.1.7 Pengertian Pejabat Pemerintah.....	17

2.2 Pengawasan Transportasi Berbasis Online.....	17
2.2.1 Pengertian Pengawasan	17
2.2.2 Tujuan Pengawasan	19
2.2.3 Pengertian Transportasi Berbasis Online	21
2.2.4 Pengertian Pengawasan Transportasi Berbasis Online.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Kerangka Konsep	24
3.3 Definisi Konsep	25
3.4 Kategorisasi	26
3.5 Narasumber.....	26
3.6 Teknik Penumpukan Data	28
3.7 Teknik Analisis Data	29
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	30
a. Profil Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	30
b. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.....	32
c. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	33
d. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	38
e. PNS di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	42

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara	45
4.2 Pembahasan.....	55
4.2.1 Akuntabilitas	55
4.2.2 Kualitas Kerja	56
4.2.4 Disiplin Kerja.....	57
4.2.4 Prestasi Kerja	58
4.2.5 Kinerja Kepemimpinan Aparatur Pemerintah dalam Pengawasan Transportasi Berbasis Online di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	59
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Simpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

3.1 Gambar Kerangka Konsep	24
3.2 Bagan Struktur Organisasi	39

DAFTAR TABEL

3.1 Daftar PNS di DinasPerhubungan Provinsi Sumatera Utara	39
4.1NarasumberBerdasarkanEselonisasi Jabatan Struktural dan Kepangkatan (Golongan/Ruang)	43
4.2NarasumberBerdasarkanPendidikan Formal dan Non Formal (Diklat).....	43
4.3NarasumberBerdasarkanumur/usia dan jenis kelamin.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Mohon Izin Penelitian
- Lampiran II : Surat Keterangan Balasan Riset Penelitian Mahasiswa
- Lampiran III : Pedoman Wawancara
- Lampiran IV : Dokumentasi
- Lampiran V : SK-1 Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran VI : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
- Lampiran VII : SK-3 Permohonan Seminar Proposal Surat Permohonan
- Lampiran VIII : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran IX : Surat Permohonan ganti Judul Skripsi
- Lampiran X : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran XI : Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja kepemimpinan Pejabat Pemerintah merupakan suatu hasil kerja dari pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas jabatannya terutama dalam mempengaruhi bawahannya yaitu pegawai ASN atau pejabat pelaksana tugas agar mereka dapat bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, dan ini merupakan hal yang sangat penting sebagai faktor penentu arah perjalanan suatu organisasi/instansi agar mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawasan, dan Jabatan Pelaksana. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik. Sedangkan Jabatan Pengawasan adalah jabatan pimpinan yang bertanggung jawab dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat Pelaksana, dan Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang dilakukan oleh pelaksana tugas yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa Pejabat dalam Jabatan Pengawasan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana agar kinerja yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus bahwa untuk mendukung kinerja kepemimpinan Pejabat Pemerintah yaitu dalam Jabatan Pengawasan, maka Pejabat Pemerintah melakukan pengawasan kepada pejabat/petugas pengawas Angkutan Sewa Khusus (Transportasi Berbasis Online), terutama kinerjanya.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan. Salah satu dari pelaksanaan fungsinya adalah melakukan Pengawasan Transportasi Berbasis Online (Angkutan Sewa Khusus). Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja petugas pengawas Transportasi Berbasis Online (Angkutan Sewa Khusus), Pejabat Pemerintah dilingkungan Dinas Perhubungan dalam melakukan kepemimpinannya masih kurang memiliki kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan masih kurang efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan pengawasan terhadap Pejabat/Petugas Pengawasan Transportasi Berbasis Online masih kurang adanya koordinasi dengan instansi terkait dan kurangnya dukungan sarana dan fasilitas kerja dalam melakukan pengawasan tersebut. Dilain pihak fenomena menunjukkan bahwa dari masyarakat maupun pemberitaan di media massa, Kepemimpinan Pejabat Pemerintah kurang berpengaruh dalam memberikan perintah atau intruksi kepada Pejabat/Petugas Pengawasan Transportasi Berbasis Online (Angkutan Sewa

Khusus). Keadaan ini masih menunjukkan bahwa masih lemahnya fungsi pengawasan yaitu terlihat dari masih banyaknya Driver transportasi berbasis Online yang tidak mengikuti standar serta aturan yang telah ditetapkan, seperti tidak memiliki kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku. Sehingga keadaan ini berdampak pada rendahnya kinerja kepemimpinan Pejabat Pemerintah dalam melaksanakan tugas tugas pengawasan kepada kinerja Pejabat Pengawas Transportasi Online.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas,penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi; Tingkat Kinerja Pemimpin Aparatur Pemerintahan dalam rangka Pengawasan Transportasi Berbasis Online di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Pada dasarnya masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Oleh karena itu, perumusan masalah merupakan hal yang sangat pentingdilakukan sehingga dapat terarah dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, mengetahui arah batas penelitian, serta meletakkan masalah pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tingkat Kinerja Pemimpin Aparatur Pemerintahan dalam rangka Pengawasan Transportasi Berbasis Online di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Pembatasan Masalah

Luasnya batasan tentang Aparatur Pemerintah yang meliputi aspek-aspek Kepegawaian, Kelembagaan, dan Ketatalaksanaan, maka dalam penelitian skripsi ini, penulis membatasi pembahasan hanya meliputi aspek kepegawaiannya yaitu mengenai Pejabat pemerintah yang melaksanakan tugas di lingkungan organisasi kerja pemerintahan. Sehingga pembahasan tentang Kinerja Kepemimpinan Aparatur Pemerintah, yang penulis bahas adalah Kinerja Pemimpin Pejabat Pemerintah yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Kinerja Pemimpin Aparatur Pemerintahan dalam rangka Pengawasan Transportasi Berbasis Online di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi dirisendiri maupun pihak lain yang berkepentingan yaitu:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini untuk menambah pengetahuan teori dan praktek mengenai Kinerja Kepemimpinan Aparatur Pemerintah serta melatih dan mengembangkan pengetahuan berfikir ilmiah juga kemampuan menulis karya ilmiah.

- b. Secara Praktis, sebagai bahan masukan, sekaligus bahan pertimbangan yang mungkin berguna dan bermanfaat dalam meningkatkan Kinerja Pemimpin Aparatur Pemerintahan.

5.1 Sistematika Penulisan

Pada penulisan Proposal ini peneliti membuat suatu sistematika dengan penulisan menjadi V (Lima) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Pembatas Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini terdiri dari : Kinerja Pemimpin Aparatur Pemerintahan (pengertian kinerja, tujuan kinerja, Sasaran kinerja, dan pengertian Pemimpin, pengertian Aparatur Pemerintah dan pengertian Pejabat Pemerintah) dan, Pengawasan Transportasi Berbasis Online (Pengertian Pengawasan, Tujuan Pengawasan dan pengertian Transportasi Online dan pengertian pengawasan transportasi berbasis online)

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisi tentang jenis penelitian, kerangka konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian dan Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pada Bab ini berisikan Hasil Penelitian, Deskripsi Hasil Wawancara, Pembahasan dan Tingkat Kinerja Pemimpin Aparatur Pemerintah dalam rangka Pengawasan Transportasi Berbasis Online di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini membuat simpulan dan saran dari hasil penelitian yang akan diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Kinerja Pemimpin Aparatur Pemerintah

2.1.1 Pengertian Kinerja

Menurut Moeheriono (2012:95) Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Arti kinerja sebenarnya berasal dari kata-kata *job performace* dan disebut juga *actual performace* atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang.

Ada beberapa pendapat tentang definisi kinerja yang dikemukakan oleh para pakar dan para ahli dengan formulasi definisi yang berbeda-beda. Rue dan Byar dalam Nawawi (2013:212) mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Interplan dalam Nawawi (2013:212) kinerja adalah berkaitan dengan koperasi, aktivitas program dan misi organisasi. Murphy dan Cleveland dalam Nawawi (2013:212) mengatakan bahwa kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan.

Pendapat lain dikemukakan oleh suntoro Dalam Nawawi (2013:213) bahwa kinerja (*performance*) adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Tika dalam Nawawi (2013:213) mengemukakan pendapat beberapa pakar tentang kinerja di konsepsikah dengan formulasi definisi yang berbeda-beda sebagai berikut. Menurut Stoner dalam Nawawi (2013:213) kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Bernardin dan Russel dalam (2013:213) mendefinisikan kinerja sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko dalam Nawawi (2013:213) kinerja sebagai proses dimana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Pendapat lain dikemukakan oleh Gibson dalam Nawawi (2013:213) bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya dikatakan pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi kemampuan dan motivasi.

Menurut Nawawi (2013:213) bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja terdiri dari; 1) Hasil-hasil fungsi pekerjaan.; 2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi karya pegawai seperti kemampuan motivasi, kecakapan dan persepsi peranan; 3) Pencapaian tujuan organisasi; 4) Priode waktu tertentu; 5) Tidak melanggar hukum; 6) Sesuai dengan moral dan etika.

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan kerja/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

2.1.2 Tujuan Kinerja

Kinerja merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan adalah tentang arah secara umum, sifatnya luas, tanpa batasan waktu dan tidak berkaitan dengan prestasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan sebuah aspirasi.

Perencanaan kinerja dimulai dengan melakukan perumusan dan mengklarifikasi tujuan yang hendak dicapai organisasi terlebih dahulu. Sesuai dengan jenjang organisasi yang dimiliki, selanjutnya tujuan yang sudah dirumuskan tersebut dirinci lebih lanjut menjadi tujuan di tingkat yang lebih rendah. Hal tersebut perlu dilakukan agar tujuan semua tingkatan manajemen yang lebih rendah memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan di atasnya. Diharapkan bahwa pencapaian tujuan semua unit kerja dibawah akan mencerminkan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Apabila orang mengetahui dan memahami apa yang diharapkan dari mereka dan mengambil bagian dalam membentuk harapan tersebut, mereka akan memberikan usaha terbaiknya untuk mendapatkannya. Kapasitas untuk mendapatkan harapan tergantung pada tingkat kapasitas yang dapat dicapai oleh individu dan tim, tingkat dukungan yang diberikan manajemen, proses, sistem, dan sumber daya yang disediakan oleh organisasi bagi mereka.

Kinerja merupakan tanggung jawab setiap individu terhadap pekerjaan, membantu mendefinisikan harapan kinerja, mengusahakan kerangka kerja bagi supervisor dan pekerja saling berkomunikasi. Tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi Kesesuaian antara

upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik Tujuan mengalir dari atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab bergerak dari bawah ke atas. Tujuan di atas memberikan inspirasi untuk penetapan tujuan di bawahnya. Sementara itu, tanggung jawab dilakukan secara berjenjang dari

2.1.3 Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan secara spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan, dan oleh siapa sasaran yang ingin dicapai tersebut diselesaikan. Sifatnya dapat dihitung, prestasi yang dapat diamati, dan dapat diukur. Sasaran merupakan harapan. Sebagai sasaran, suatu kinerja mencakup unsur-unsur di antaranya: 1) *the performers*, yaitu orang yang menjalankan kinerja; 2) *the action atau performance*, yaitu tentang tindakan atau kinerja yang dilakukan oleh performer; 3) *time element*, menunjukkan waktu kapan pekerjaan dilakukan; 4) *an evaluation method*, tentang cara penilaian bagaimana hasil pekerjaan dapat dicapai; dan 5) *the place*, menunjukkan tempat dimana pekerjaan dilakukan Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik dalam bentuk kata kerja secara spesifik dan dapat diukur. Perkataan menurunkan, meningkatkan, dan mendemonstrasikan bersifat lebih efektif dari pada mengawasi, mengorganisasi, memahami, mempunyai pengetahuan atau apresiasi.

2.1.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau

diharapkan naskah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang Untuk melakukan pengukuran tersebut, diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja. Pengukuran kinerja hanya dapat dilakukan terhadap kinerja yang nyata dan terukur. Apabila kinerja tidak dapat diukur, tidak dapat dikelola. Untuk dapat memperbaiki kinerja, perlu diketahui seperti apa kinerja saat ini. Apabila deviasi kinerja dapat diukur, dapat diperbaiki. Pengukuran hanya berkepentingan untuk mengukur apa yang penting dan relevan. Untuk itu, perlu jelas tentang apa yang dikatakan penting dan relevan sebelum menentukan slouran apa yang harus digunakan. Hal-hal yang diukur terhitung pada apa yang dianggap penting oleh stakeholders dan pelanggan. Pengukuran mengatur keterkaitan antara strategi berorientasi pelanggan dan tujuan dengan tindakan.

Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan dilakukan dengan cara: 1) memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi; 2) mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan bandingan; 3) mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja; 4) menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perluprioritas perhatian; 5) menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas; 6) mempertimbangkan penggunaan sumber daya; 7) mengusahakan umpan balik untuk mendorong usar perbaikan.

Menurut Kreitner dan Kinicki dalam Rivai dan Mulyadi (2011:54) bahwa orang yang melakukan pengukuran kinerja perlu memenuhi persyaratan diantaranya;1) dalam posisi mengamati perilaku dan kinerja yang menjadi

kepentingan individu; 2) mampu memahami tentang dimensi atau gambaran kinerja mempunyai pemahaman tentang format skala dan instrumennya dan 3) harus termotivasi untuk melakukan pekerjaan rating secara sadar.

2.1.5 Pengertian Pemimpin

Pemimpin/leader mempunyai macam-macam pengertian dari para ahli. Berikut ini terdapat beberapa definisi tentang pemimpin yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya : Menurut Hasibuan (2011:157), pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Kartono (2010:18), pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Menurut Henry Pratt Fairchild (dalam Kartono 2010:23) pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial 11 dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui kekuasaan dan posisi. Sebagaimana diungkapkan Sedarmayanti (2009-119) bahwa pemimpin (leader) adalah :

- a. Seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan.
- b. Seseorang yang menjalankan kepemimpinan sedangkan pimpinan (manager) adalah seseorang yang menjalankan manajemen. Orang yang sama harus menjalankan dua hal secara efektif: manajemen dan kepemimpinan.

c. Orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan.

d. Kata “pemimpin” mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hierarki tertentu dalam organisasi, yang mempunyai bawahan, karena kedudukan yang bersangkutan mendapatkan atau mempunyai kekuasaan formal, dan tanggung jawab.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan, dan kerja sama dari orang-orang diluar kelompok atau organisasi.

Adapun kepemimpinan menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Stephen P. Robbins dalam Tambunan (2015:91) Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi kelompok menuju tercapainya sasaran. Sedangkan Ricky W. Griffin dalam Tambunan (2015:91), mendefinisikan kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh tanpa paksaan untuk membentuk tujuan-tujuan grup atau organisasi, memotivasi perilaku kearah tujuan tersebut dan membantu mendefinisikan kultur grup atau organisasi.

Yulk dalam Tambunan (2015:95), mengartikan kepemimpinan sebagai proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Blanchard dan Ridge dalam Tambunan (2015:95), menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah kemitraan, salah satunya yang melibatkan Mutual Trust dan rasa hormat diantara dua orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Dari beberapa pengertian kepemimpinan yang dikemukakan para ahli diatas Tambunan (2015:96) memberi kesimpulan bahwa pemimpin adalah seseorang yang menduduki posisi formal dalam suatu organisasi atau negara; memiliki peran, tanggung jawab dan kewenangan (kekuasaan) terhadap organisasi atau negara yang dipimpinnya serta mengarahkan sumber daya -sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

1). Jenis-jenis Perilaku Kepemimpinan

a) Perilaku Menyebarkan Informasi(Information)

Perilaku menyebarkan informasi, yaitu perilaku atau tindakan pemimpin dalam menyebarkan informasi yang relevan seperti keputusan dan rencana, memberi informasi teknis yang dibutuhkan bawahan Blam melakukan pekerjaannya, menginformasikan kepada bawahan tentang kemajuan yang dicapai organisasi secara keseluruhan Penyebaran informasi merupakan sarana organisasi dalam rangka pengembangan organisasi maupun untuk membina hubungan kerja

antara anggota organisasi. Demikian pentingnya informasi tersebut sehingga banyak ahli berpendapat bahwa perkembangan organisasi.

b) Perilaku Konsultasi dan Delegasi (Consulting and Delegating)

Perilaku konsultasi dan delegasi, yaitu perilaku atau tindakan pemimpin untuk membahas bersama pihak lain sebelum membuat keputusan, memberikan saran yang dapat mendorong kemajuan, memberikan kesempatan atau keleluasaan pada bawahan untuk mengambil keputusan secara mandiri, menampung ide dan saran dari bawahan sebelum mengambil keputusan serta memberi kesempatan kepada bawahan untuk melaksanakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok.

c) Perilaku Perencanaan dan Pengorganisasian (Planning and Organizing)

Perilaku perencanaan dan pengorganisasian, yaitu perilaku atau tindakan pemimpin dalam wujud merumuskan tujuan dan strategi untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan berumurkan bagaimana mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan merumuskan bagaimana mengembangkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan dan bagaimana melakukan koordinasi yang baik dengan pihak lain Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, diperlukan perencanaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Rencana berfungsi sebagai pengarah kegiatan, alat kontrol penyimpangan, bahkan sebagai strategi pencapaian tujuan. Oleh karena itu, setiap organisasi sebelum melakukan sesuatu kegiatan selalu terlibat dalam proses perencanaan. Pimpinan organisasi sebagai penanggung jawab jalannya organisasi tidak lepas dari proses perencanaan, karena

pada akhirnya hasil proses perencanaan harus diputuskan oleh pimpinan organisasi.

d) Perilaku Pemecahan Masalah (Problem Solving)

Perilaku pemecahan masalah, yaitu perilaku atau tindakan pemimpin dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, menganalisis masalah secara sistematis dan terus-menerus guna mengidentifikasi penyebab dan menemukan pemecahannya konsekuen melaksanakan keputusan dan tegas dalam mengatasi masalah atau krisis yang dihadapi organisasi.

e) Perilaku Merumuskan Peranan dan Tujuan (Clarifying)

Pelaku merumuskan peranan dan tujuan yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin dalam wujud merumuskan tugas-tugas, menetapkan arah pekerjaan, memberi pengertian tentang tanggung jawab yang diemban sehubungan dengan jabatan, merumuskan tujuan yang akan dicapai, menentukan batas waktu penyelesaian tugas, dan mengarahkan bawahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas organisasi.

f) Perilaku Pemantauan (Monitoring)

Perilaku pemantauan yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin guna memperoleh informasi tentang kegiatan kerja melalui pengecekan tentang kemajuan dan kualitas pekerjaan, evaluasi kinerja bawahan dan unit instansi di lingkungan organisasi dan melakukan pengamatan untuk mengetahui berbagai peluang dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas dan program organisasi.

g) Perilaku Motivasi

Perilaku motivasi, yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin untuk mempengaruhi emosi bawahan dengan menggunakan nilai nilai serta logika guna mendorong antusiasme atau semangat kerja pegawai, menumbuhkan komitmen terhadap tujuan dan tugas, bersedia melakukan kerja sama, memberi bantuan dan dukungan.

h) Perilaku Pengakuan dan Penghargaan

Perilaku pengakuan dan penghargaan, yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin untuk menyediakan hadiah, pengakuan dan penghargaan kepada bawahan yang kecakapannya baik, dan yang memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan organisasi.

i) Perilaku Dukungan(Supporting)

Perilaku dukungan, yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin yang terungkap dalam bentuk sifat bersahabat, baik budi, suka mem bantu, selalu menunjukkan dukungan dan simpati kepada bawahan dan melakukan sesuatu untuk mendorong bawahan agar skill-nya meningkat dan kariernya berkembang.

j) Perilaku Mencegah Konflik dan Mengembangkan Kelompok
(ManagingConflictand Team Building)

Perilaku mencegah konflik dan mengembangkan kelompok, yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin untuk mendorong dan menyediakan fasilitas yang konstruktif dalam pemecahan masalah; dan mendorong atau mengembangkan kerja sama kelompok yang cok dalam penyelenggaraan tugas-tugas atau program organisasi.

k) Perilaku Membuat Jaringan

Perilaku membuat jaringan, yaitu perilaku atau sikap dan tindakan pemimpin dalam wujud membaaur secara informal, membangun hubungan dengan orang yang memiliki sumber informasi dan dukungan, memantapkan hubungan dengan semua pihak yang terlet secara periodik melalui kunjungan, telepon, surat-menyurat dan kehadiran dalam rapat serta even-even sosial lainnya.

2.1.6 Pengertian Aparatur Pemerintah

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Aparatur pemerintah adalah Profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, Aparatur Sipil Negara harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Menurut Kadarisman (2018) Aparatur Pemerintah adalah salah satu unsur yang paling vital di dalam instansi pemerintah, sehingga manajemen pegawai ASN atau manajemen kepegawaian merupakan salah satu instrumen penting bagi organisasi publik dalam mencapai berbagai tujuan. Sedangkan menurut Nawawi (1992) Aparatur pemerintah merupakan pusat kegiatan penegak hukum. Posisi itu

menyebabkan aparatur pemerintah mendapat sorotan yang tajam apabila melakukan penyimpangan dan pelanggaran hukum.

Dapat disimpulkan bahwa Aparatur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah yang diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.

2.1.7 Pengertian Pejabat Pemerintah

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 pasal 1 menyebutkan bahwa pejabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam Pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

Dapat disimpulkan bahwa Pejabat Pemerintah adalah seseorang yang menduduki suatu jabatan tertentu pada lembaga pemerintahan.

2.2 Pengawasan Transportasi Berbasis Online

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Bohari, (1992:4).mengatakan bahwaPengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebihatas kepada pihak dibawahnya. Dalam karyanya Dasar-dasar Management, memandang bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelak sanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dijelaskan Bohari,(1992:4).Bahwa dalam Seminar ICW tanggal 30 Agustus 1970, telah

disepakati definisi dari Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Bertolak dari pandangan tentang pengertian pengawasan yang dikemukakan di atas, maka jelaslah pengertian yang sesungguhnya tentang Pengawasan, yaitu suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula Pengawasan dalam judul Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, adalah pengawasan dalam arti controlling itu. Ini adalah pengawasan dalam arti luas. Setiap manajer atau pimpinan organisasi, mau tidak mau harus melaksanakan fungsi pengawasan tersebut apabila ia ingin tugasnya berhasil dengan baik. Dalam bahasa Indonesia, fungsi controlling itu mempunyai dua padanan, yaitu pengawasan dan pengendalian.

Menurut Sujamto (1987:75) Pengawasan di sini adalah pengawasan dalam arti sempit, yang saya beri definisi sebagai : segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forceful* daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya. Sebenarnya dalam

pengertian pengendalian ini sudah tercakup pula pengawasan dalam arti sempit tersebut. Hal ini adalah logis suatu tanpa mengawasinya Kita tidak mungkin mengendalikan sesuatu tanpa mengawasinya Oleh karena itu sebenarnya pengendalian itu sama dengan pengan plus sesuatu, dan sesuatu ini adalah kewenangan Tindakan Korektif (TK), Sehingga letak perbedaan antara pengawasan (dalam arti sempit dengan pengendalian itu adalah pada kewenangan untuk melakukan tindakan korektif. Pengendali yaitu manajer atau pimpinan organisasi, memiliki wewenang untuk melakukan tindakan korektif, baik terhadap manusia pelaksana (petugas yang dipimpinnya maupun terhadap sistem yang berlaku dalam organisasinya. Apabila dari hasil pengawasan yang ia lakukan sendiri atau yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang membantunya, diketahui adanya hal-hal yang menyimpang dari yang semestinya (yaitu yang disebut sebagai standar pengawasan) maka ia dapat mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar seluruh sistem yang telah ditetapkan, berjalan kembali sesuai dengan yang semestinya.

Sujamto, (1987:96). menyimpulkan bahwa dari fungsi *controlling* atau pengawasan dalam arti luas, yang terdiri dari pengawasan (dalam arti sempit) dan pengendalian itu ada bagian yang dapat didelegasikan kepada bawahan dan ada yang tidak. Yang tidak dapat didelegasikan adalah fungsi pengendalian, sedang yang dapat didelegasikan adalah fungsi pengawasan, yang definisinya telah saya kemukakan. Pengawasan dalam arti sempit inilah yang lazim disebut pula sebagai pengawasan fungsional. Dengan demikian kiranya dapatlah difahami mengapa aparat-aparat pengawasan fungsional seperti BPKP, Inspektorat Jenderal

Departemen dan lain-lain itu secara formal tidak memiliki atau tidak diberi wewenang untuk melakukan tindakan korektif

2.2.2 Tujuan Pengawasan

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap suatu organisasi dengan tujuan agar organisasi tersebut melaksanakan tugasnya serta fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Salah satu teknik pengawasan yang lazim dilaksanakan adalah pemeriksaan, yaitu kegiatan untuk menilai apakah hasil pelaksanaan yang sebenarnya telah sesuai dengan yang seharusnya dan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau hambatan yang ditemukan. Bohari (1992:4) menegaskan bahwa tujuan pengawasan antara lain adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandinaknya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan/penanggung jawab fungsi/kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Pengawasan bukan ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah.

Menurut Sujamto (1987:96), tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa datang, dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan daripada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. Tugas pengawasan sebenarnya cukup jelas dapat disimpulkan pengarahan Bapak Presiden sebagaimana yang kami kutip di muka, yaitu bahwa pengawasan itu "bukan ditunjukkan untuk mencari cari kesalahan atau mencari siapa yang salah. Tujuan

utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah (dan juga apa yang tidak salah, pen) demi perbaikan di masa yang akan datang dengan tidak merubah arti, tujuan pengawasan dapat pula dirumuskan sebagai:

Untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi obyek pengawasan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang.

2.2.3 Pengertian Transportasi Berbasis Online

Adisasmita (2015:9) Transportasi merupakan sektor tersier, yaitu sektor yang menyediakan jasa pelayanan kepada sektor-sektor lain (pertanian, perindustrian, perdagangan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lainnya). Fungsi transportasi adalah memindahkan atau mengangkut muatan (barang dan manusia) dari suatu tempat ketempat lain, yaitu dari tempat asal ketempat tujuan.

Alat transportasi ada bermacam-macam yaitu; transportasi darat,laut dan udara. Melihat begitu pentingnya peran transportasi dalam kehidupan sehari-hari muncullah transportasi berbasis Online. Salah satunya adalah transportasi darat. Jasa transportasi Online merupakan jasa yang memanfaatkan kemajuan teknologi.

Dalam Undang Undang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 bahwa Transportasi Online (Angkutan Sewa Khusus) adalah Pelayanan Angkutan dari Pintu Kepintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.

Menurut Wijaya (2016) Transportasi Online adalah pelayanan jasa transportasi darat berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri menggunakan Aplikasi Online.

2.2.4 Pengertian Pengawasan Transportasi Berbasis Online

Dalam Undang Undang Nomor 118 tahun 2018 tentang Pengawasan menyebutkan bahwa Pengawasan Transportasi Berbasis Online adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Transportasi Berbasis teknologi informasi. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan peralatan secara manual atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dilakukan di ruas jalan kawasan perkotaan dan simpul transportasi sesuai dengan wilayah operasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiono (2017:1) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiono (2017:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Dengan demikian maka peneliti akan mengumpulkan data tentang Kinerja Kepemimpinan Aparatur Pemerintah dalam Pengawasan Transportasi Berbasis Online, lalu di uraikan secara rasional dan diambil kesimpulan.

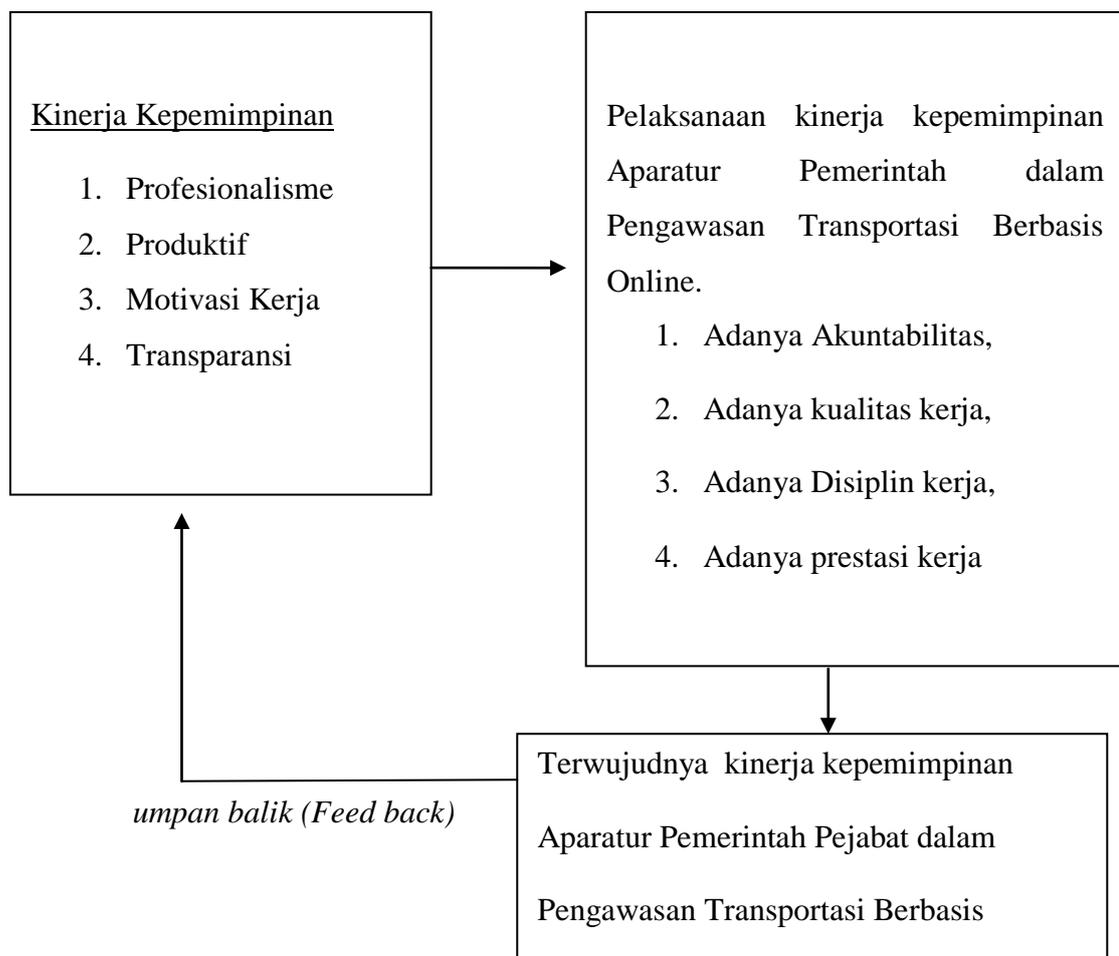
3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan dasar pemikiran dalam mengkaji sesuatu masalah yang akan dibahas.

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah:

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP KINERJA KEPEMIMPINAN APARATUR PEMERINTAH



3.3 Definisi Konsep

Definisi Konsep adalah batasan tinjauan yang menjelaskan suatu konsep yang akan diteliti dalam bentuk variabel. Selain itu definisi konsep merupakan unsur penelitian yang memberikan batasan pengukuran suatu variabel. Maka definisi konsep yang penulis buat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan atau hasil kerja.
2. Aparatur Pemerintah adalah Profesi bagi pegawai Negri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam Pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
4. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Transportasi Online atau disebut dengan Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan jasa transportasi darat berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri dengan menggunakan Aplikasi Online.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian untuk pendukung analisis dari variabel tersebut. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Adanya laporan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah/Pejabat Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan kepada pejabat pengawas.
- b. Adanya Kualitas Kerja Aparatur Pemerintah/ Pejabat Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan kepada petugas pengawas transportasi berbasis Online.
- c. Adanya Disiplin Kerja yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah/Pejabat Pemerintah dalam menjalankan tugas pengawasan.
- d. Adanya Prestasi Kerja yang dicapai oleh Aparatur Pemerintah/Pejabat Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan kepada petugas pengawas Transportasi Berbasis Online.

3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi untuk kepentingan pemberitaan. Biasanya, informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui pegawai yang bekerja dari instansi pemerintahan. Teknik penentuan narasumber dalam penelitian digunakan metode *purposive sampling*, yaitu memilih sejumlah responden dengan pertimbangan tertentu yang dianggap paling tahu tentang objek penelitian yang diteliti sehingga

dapat memberikan data yang maksimal. Sedangkan teknik *snowball sampling* dilakukan dengan menambah narasumber penelitian guna mendapat data yang memuaskan.

Melalui teknik *purposive sampling* diperoleh informan utama yaitu Sekertaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sebagai Sekertaris yang dianggap paling mengetahui dan memahami kualitas kinerja dalam melakukan Pengawasan Transportasi Berbasis Online di Kota Medan, Binjai, Deli Serdang. Sementara melalui teknik *snowball sampling* diperoleh informan yang mendukung yaitu 5 orang Pejabat Pemerintah yang dianggap mampu memberikan informasi terkait dengan Kinerja Kepemimpinan Aparatur Pemerintah dalam Pengawasan Transportasi berbasis Online di Dinas Perhubungan provinsi Sumatera Utara.

Adapun Narasumber dari Penelitian ini adalah:

1. Sekertaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yaitu Ibu Rochani litiloly.,ST.,MT
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Rustam Efendi Harahap
3. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Drs.Iswan Masyhur Harahap
4. Kepala Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak H. Umar Khayan.,SH

5. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
yaitu Bapak Darwin Purba.,MT

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapat data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis yang standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Adapun yang menjadi langkah penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber atau responden yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data sekunder

Merupakan hasil pengumpulan data yang diteliti dan dipelajari sebagai literatur, buku-buku, dokumen-dokumen maupun catatan tulisan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun cara pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (*reliabilitas*) dan keahliannya (*validitasnya*).

- b. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut dengan *interviewee*.
- c. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk data-data, foto, serta catatan lapangan demi mempermudah dalam penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Ardhana dalam Moleong (2016) Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.

Menurut Miles dan Huberman dalam Gunawan (2013:210-211) ada dua tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Reduksi data (data reduction), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemutusan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh.
- b. Penyajian data (data display), peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and Verification). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Dinas ini yang mengatur segala penyelenggaraan perhubungan di Sumatera Utara.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Profil Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Departemen perhubungan telah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode kabinet-kabinet Republik Indonesia. Rencana strategi dinas perhubungan disusun berawal dari pemikiran strategis tentang nilai-nilai luhur yang dianut atau dimiliki oleh seluruh pimpinan dan staf dinas perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan karakteristik inti dari tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah Peraturan Daerah Sumatera Utara, dimana dalam pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah Provinsi dan tugas dekonsentrasi antara lain:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan/ program dan kebijaksanaan teknis bidang perhubungan.
- b. Menyelenggarakan pembinaan perhubungan bagian darat, bagian laut, bagian udara, pengawasan dan pengendalian serta pos dan telekomunikasi.
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan perhubungan sesuai ketetapan kepala daerah.

Dasar hukum pelaksanaan tugas otonomi tertuang dalam surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 060.255/K tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan serta Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan dasar hukum pelaksanaan tugas Dekonsentrasi dituangkan dalam:

- a. SE Menhub No 27 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Tugas eks Kanwil Dephub setelah Otonomi Daerah.
- b. SK Menhub No 45 tahun 2002 tentang Penyerahan Penyelenggaraan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. SK Menhub No 53 tahun 2002 tentang Tatanan Kepe;anuhan Nasional
- d. SK Menhub No 56 tahun 2002 tentang Pelimpahan/Penyerahan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
- e. SK Menhub No 4 tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja anatar Departemen Perhubungan dengan Provinsi.
- f. SK Menhub No 38 tahun 2013 tentang perubahan atas Kepmenhub No 4 tahun 2013 tentang Tata Hubungan Kerja antar Departemen Perhubungan Dengan Provinsi yang menyangkut Kewenangan yang di Dekonsentrasi.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

a. Visi

Visi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam upaya menciptakan masyarakat Sumatera Utara yang beriman, maju, mandiri mapan dan berkeadilan didalam kebhinekaan yang didukung tata pemerintahan yang baik.

Handal meliputi:

Aman, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdaya saing meliputi:

Efisien, harga terjangkau, ramah lingkungan, berkelanjutan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, mandiri dan produktif.

Memberikan nilai tambah meliputi:

Tumbuhnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat dan pengusaha kecil, menengah, koperasi, memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan lapangan kerja.

b.Misi

Misi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah membangun dan serta mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang bertumpuh pada pertanian,

agroindustri, pariwisata dan sektor-sektor unggulan serta mengembangkan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dengan cara:

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan (rekondisi/survival).
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dibidang perhubungan dan menegakkan hukum secara konsisten (reskontruksi dan reposisi).
3. Meningkatkan akseibilitas masyarakat terhadap pelayanan perhubungan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan jasa perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberi nilai tambah.

3.9.3 Tugas Dinas Perhubunga Provinsi Sumatera Utara

Berikut ini adalah job description dari setiap unit pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

b. Wakil Kepala Dinas

Wakil Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan di bidang Perhubungan.

c. Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang Kepegawaian,Keuangan. Umum dan Perlengkapan, Organisasi dan Hukum.

d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan Standar administrasi pengelolaan pembinaan dan pemberdayaan Pegawai.Menyelenggarakan Administrasi dan Analisis Kebutuhan pegawai, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.

e. Kepala Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar verifikasi, perbendaharaan, pengelolaan, pertanggung-jawaban anggaran belanja rutin dan keuangan.
- 2) .Menyusun rencana belanja rutin, melaksanakan anggaran, penerimaan/ penyimpanan/pembayaran uang, pembukuan/ administrasi dan pertanggung-jawaban keuangan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.

f. Kepala Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar prosedur penyelenggaraan urusan Tata Usaha,

urusan internal, kehumasan, perjalanan Dinas dan Administrasi, pengelolaan, pendayagunaan dan penghapusan barang aset milik Negara.

- 2) Menyelenggarakan tata naskah, surat menyurat, tata Kearsipan, dokumentasi, urusan internal, publikasi, komunikasi, perjalanan dinas, penataan ruang dan pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi, pemeliharaan, penyimpanan dan penghapusan barang-barang inventarisasi aset milik Negara, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

g. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum

Mempunyai tugas :

- 1) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan /data untuk penyusunan dan penyempurnaan Standar prosedur kerja, tata kerja, sarana Administrasi dan Pelayanan.
- 2) Melaksanakan upaya pemantapan tata hubungan kerja, pengawasan standar kinerja, sarana Administrasi, sistem pelayanan, serta pengkajian dan penelaahan produk Hukum, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.

h. Kepala Sub Dinas Bina Program

Mempunyai Tugas:

- 1) Kepala Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Data dan Informasi, Evaluasi dan Laporan serta Rencana Program.
- 2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, Kepala Sub Dinas Bina Program dibantu oleh:

- a. Kepala Seksi Penyusunan Program
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Dan Evaluasi
 - c. Kepala Seksi Data Dan Informasi
- i. Kepala Sub Dinas Darat

Mempunyai Tugas:

- 1) Kepala Sub Dinas Darat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Lalu Lintas, Angkutan, Prasarana dan Keselamatan Teknik Sarana serta pembinaan teknis terhadap Asosiasi Sub sektor Perhubungan Darat.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, Kepala Sub Dinas Darat dibantu oleh:
 - a. Kepala Seksi Lalu Lintas
 - b. Kepala Seksi Angkutan
 - c. Kepala Seksi Prasarana
 - d. Kepala Seksi Keselamatan Teknik Sarana
- j. Kepala Sub Dinas Laut

Mempunya Tugas :

- 1) Kepala Sub Dinas Laut, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Angkutan Laut, Kepelabuhan, Kappel serta Navigasi dan Gamat, pembinaan teknis terhadap Asosiasi Sub Sektor Perhubungan laut.
- 2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, Kepala Sub Dinas Laut dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi Angkutan laut
 - b. Kepala Seksi Kepelabuhan

- c. Kepala Seksi Kappel
- d. Kepala Seksi Nav Dan Gammat

k. Kepala Sub Dinas Udara

Mempunyai tugas :

- 1) membantu Kepala Dinas dalam bidang pengawasan dan pengendalian kegiatan Angkutan Udara, Keselamatan Penumpang dan Penerbangan Kebandarudaraan serta pembinaan teknis terhadap Asosiasi sub Sektor Perhubungan Udara.
- 2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, Kepala Sub Dinas Udara dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi Angkutan Udara
 - b. Kepala Seksi Kespen
 - c. Kepala Seksi Kebandarudaraan

l. Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian

Mempunyai Tugas :

- 1) Kepala Sub/Dinas Pengawasandan Pengendalian/mempunyai tugas membantu/ Kepala Dinas dalam pengawasan pengelolaan Jembatan Timbang, Pengawasan penegakan ketentuan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan serta pembinaan/pengembangan kegiatan sarana.
- 2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi Jembatan Timbangan
 - b. Kepala Seksi Pengawas Kendaraan Bermotor Di Jalan

c. Kepala Seksi Sarana

m. Kepala Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi

Mempunyai Tugas :

- 1) Kepala Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Pos, Telekomunikasi serta Teknologi Informatika dan Asosiasi Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, Kepala Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi Pos
 - b. Kepala Seksi Telekomunikasi
 - c. Kepala Seksi Teknologi Informatika

3.9.4 Struktur Organisasi

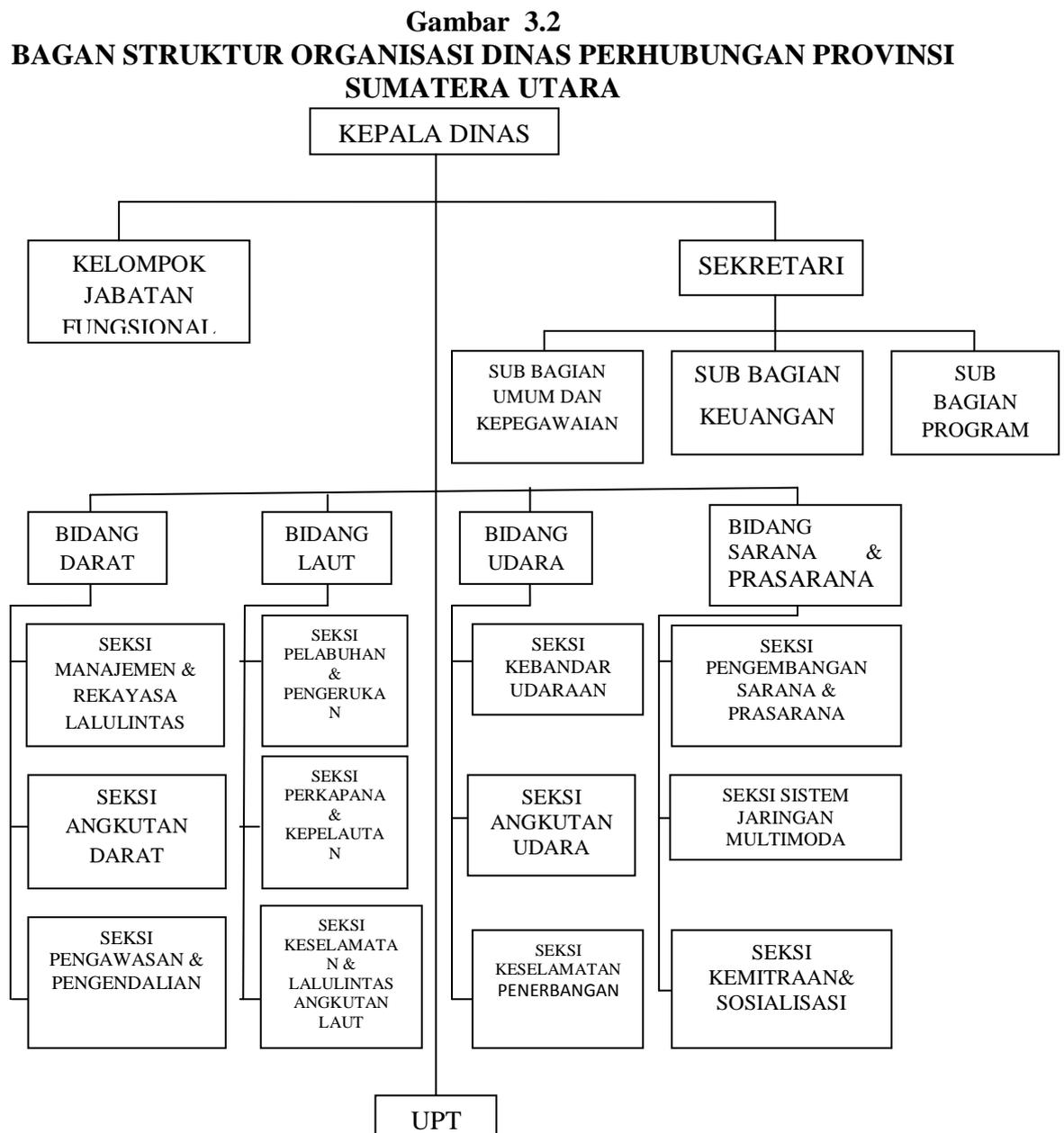
Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/ keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga perusahaan dapat dicapai. Suatu

instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal melalui saluran tunggal.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini:



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020

c. PNS di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3.1 : Daftar PNS di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

No	Nama	Jenis Kelamin		Pangkat/ Golongan
		P	L	
1.	ABDUL HARIS LUBIS, .M., Si		L	Pembina Utama Muda (IV/c)
2.	ROCHANI LITILOLY, .ST, MT	P		(IV/b)
3.	DARWIN PURBA, .MT		L	(IV/b)
4.	DRS. ISWAN MAHSYUR HARAHAP	L		(III/d)
5.	AGUSTINUS, .S. SIT., MT	L		(IV/a)
6.	OCTAVIANUS SINULINGGA, .SH	L		(IV/b)
7.	MEGARIA KRISTIANA, .S. STP., M. Si	P		(IV/a)
8.	DOMINIKUS ESTI W., A. Md LLAJ	P		(III/d)
9.	AGUS SALIM HASIBUAN	L		(III/d)
10.	Hj. SITI MARDIAH, .SE	P		(III/d)
11.	SRI GUSTINA, .SE	P		(III/d)
12.	EDY NARDIANTO, .SE	L		(III/d)
13.	SOMBU D H SITUMORANG, .S. Kom	L		(III/c)
14.	GANE SISWANTO	L		(III/b)
15.	MUJIASNI	P		(III/b)
16.	SYAHRINA	P		(III/b)
17.	RUSTAM EFENDI HARAHAP	L		(III/b)
18.	MUHAMMAD ALI IDRIS	L		(III/a)

Tabel 3.1 : Daftar PNS di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara**(sambungan)**

19.	LISDA HARIANI HARAHAP	P	(III/a)
20.	ARJUNA ISMARI	L	(II/d)
21.	MUHAMMAD AMIN	L	(II/d)
22.	NGADIMIN	L	(I/d)
23.	NURHARIYANI.,SE	P	(III/d)
24.	Hj. SYAFRIDA	P	(III/c)
25.	RETTI MELIANA	P	(III/b)
26.	ELISABETH P br.RUMAPEA	P	(III/b)
27.	FAUZI HARDIANSYAH.,ST	L	(III/b)
28.	AMALUDDIN SIREGAR.,M.Ad	L	(III/a)
29.	IRMA HANUM LUBIS.,A.Md	P	(III/a)
30.	NURMALA	P	(II/c)
31.	ASNITA	P	(II/c)
32.	MUHAMMAD IDRIS.,S.ST	L	(III/d)
33.	AFRIDA NATALIA SARAGIH.,ST	P	(III/b)
34.	EVARINA NURIHISA GINTING.,SE	P	(III/b)
35.	RENO SIDI.,A.Md	L	(II/d)
36.	FACHRUR ROZY HASIBUAN	L	(II/b)
37.	RIVI HANDYKA SINAGA	L	(II/b)
38.	Drs. BENJAMIN GULTOM.,MM	L	(II/b)

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini menguraikan dan menyajikan hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Dengan demikian maka peneliti akan mengumpulkan data tentang Kinerja Kepemimpinan Aparatur Pemerintah dalam Pengawasan Transportasi Berbasis Online di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Untuk memperoleh data primer maka sumber aslinya berupa wawancara secara langsung kepada beberapa narasumber di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu untuk memperoleh data yang lengkap, maka dibutuhkan data sekunder dalam pengambilan data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen yang dimiliki oleh kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan dengan sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Keadaan Narasumber dalam penelitian ini disusun berdasarkan Eselonisasi dalam jabatan struktural, Kepangkatan (Golongan/Ruang), Pendidikan Formal, Usia/Umur, dan jenis Kelamin yaitu sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Keadaan Narasumber Berdasarkan Eselonisasi Jabatan Struktural dan
Kepangkatan (Golongan/Ruang)

No	Nama	Eselon	Golongan/Ruang	Jumlah
1	Rochani litololy.,ST.,MT	II/b	IV/b	1
2	Rustam Efendi Harahap	IV/b	III/b	1
3	Drs. Iswan Masyhur Harahap	III/b	III/d	1
4	H.Umar Khayan.,SH	III/b	III/d	1
5	Darwin Purba.,MT	II/b	IV/b	1
Jumlah				5

Sumber : Dinas Perhubunga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Tabel 4.2
Keadaan Narasumber Berdasarkan Pendidikan Formal dan Non
Formal (Diklat)

No	Nama	Pendidikan Formal	Pendidikan & Pelatihan	Jumlah
1	Rochani litiloly.,ST.,MT	S-2	DIKLAT PIM TK.III	1
2	Rustam Efendi Harahap	S-1	DIKLAT PIM TK.IV	1
3	Drs. Iswan Masyhur Hrp	S-1	SEPALA	1

Tabel 4.2
Keadaan Narasumber Berdasarkan Pendidikan Formal dan Non
Formal (Sambungan)

4	H.Umar Khayan.,SH	S-1	DIKLAT PIM TK.IV	1
5	Darwin Purba.,MT	S-1	-Pelatihan Pendekatan kapasitas SDM -Sosialisasi pencegahan tindakan pidana korupsi dalam pengelolaan APBD -penyuluhan pelanggaran pertama kecelakaan transportasi jalan dan KA,	1
Jumlah				5

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Tabel 4.3
Keadaan Narasumber Berdasarkan umur/usia dan jenis kelamin

No	Nama	Usia/umur	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Rochani litiloly.,ST.,MT	49	P	1
2	Rustam Efendi Harahap	52	L	1

Tabel 4.3**Keadaan Narasumber Berdasarkan umur/usia dan jenis kelamin (Sambungan)**

3	Drs. Iswan Masyhur Hrp	56	L	1
4	H.Umar Khayan.,SH	52	L	1
5	Darwin Purba.,MT	57	L	1
Jumlah				5

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara

a. Adanya laporan akuntabilitas kinerja Aparatur Pemerintah/Pejabat Pemerintah melaksanakan pengawasan kepada petugas pengawas Transportasi Berbasis Online.

Akuntabilitas adalah tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan memberikan pelayanan yang optimal, sehingga hasil kerja yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam melakukan pengawasan kepada petugas pengawas transportasi berbasis Online berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Umar Khayan.,SH selaku Kepala seksi Perkeretaapian dan pengembangan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa, 18 Februari 2020 yang menyatakan bahwa “bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pejabat pemerintah dalam melakukan pengawasan Transportasi Berbasis Online sudah sesuai yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang Peraturan Menteri (PERMEN) No 118 tahun 2018 yaitu tentang Angkutan Sewa Khusus, karena peraturan ini merupakan peraturan yang baru dikeluarkan kembali mengenai Transportasi berbasis Online setelah beberapa kali di ubah, kemudian adanya rapat atau pertemuan dengan beberapa Organisasi Angkutan Darat (Organda) baik organda Medan, Provinsi, Binje dan

Deli Serdang, selanjutnya melakukan beberapa Asosiasi kepada Angkutan Online, Driver dan Pengusaha-pengusaha Transportasi Berbasis Online (Angkutan Sewa Khusus) walaupun begitu tetapi tetap saja ada Driver yang membangkang dan tidak mengikuti aturan yang sudah berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) No 118 tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK) dan yang terakhir Pejabat Pemerintah memberikan usulan pembuatan Pergub tentang Transportasi Berbasis Online (Angkutan Sewa Khusus) untuk penambahan kuota Transportasi Berbasis Online yang akan beroperasi di Sumatera Utara ini.”

Selanjutnya sarana seperti fasilitas untuk melakukan pengawasan transportasi berbasis Online sudah ada seperti mobil penertiban dan mobil sosialisasi tetapi masih kurang untuk menampung petugas yang akan melakukan pengawasan transportasi berbasis Online di lapangan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Iswan Masyhur Hrp selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, 20 Februari 2020 menyatakan bahwa “Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap petugas pengawas transportasi Online sudah seoptimal mungkin dengan cara tetap melakukan kontrol kepada para petugas pengawas transportasi berbasis Online dan para petugas juga diberikan arahan untuk selalu memberi laporan yang ada dilapangan agar Pejabat Pemerintah tetap tahu hasil pekerjaan yang ada dilapangan.”

Selanjutnya sarana seperti fasilitas dalam melakukan pengawasan tersebut masih kurang sehingga dapat menghambat para petugas untuk melakukan

pengawasan terhadap transportasi berbasis Online. Hal ini membuat hasil kerja yang dilakukan kurang maksimal.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Darwin Purba,.MT selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada hari kamis 20 februari 2020 menyatakan bahwa “bentuk tanggung jawab yang dilakukan Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online sudah ada akan tetapi masih kurangnya koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait seperti Dirlantas Polri, Dishub Kabupaten/Kota, Medan, Deli Serdang, Binjai dan Jasa Raharja. Dikarenakan keberadaan instansi ini sangat penting dalam pengawasan Transportasi Berbasis Online, Namun pada kenyataannya beberapa instansi pemerintah diatas sama sekali tidak mempengaruhi pengawasan transportasi berbasis Online secara optimal. Mereka tidak saling menganggap bahwa instansi lainnya sangat penting dalam menjalankan pengawasan transportasi berbasis Online di medan agar pengawasan tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Kurangnya komunikasi dan koordinasi menjadi salah satu kendala dalam pengawasan transportasi berbasis Online.”

Sarana seperti fasilitas yang disediakan memang sudah ada akan tetapi fasilitas tersebut belum cukup memadai untuk melakukan penertiban dan sosialisasi dalam pengawasan transportasi berbasis Online. hal ini yang membuat terkendalanya pengawasan yang akan dilakukan dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai adanya tanggung jawab Pejabat Pemerintah dalam pengawasan transportasi berbasis Online sudah ada walaupun belum maksimal seperti masih kurang maksimal karena Pejabat

Pemerintah belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online sehingga pengawasan tersebut masih terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya fasilitas untuk melakukan pengawasan tersebut yaitu mobil untuk melakukan sosialisasi dan mobil penertiban. Kemudian kurangnya koordinasi dengan instansi terkait menjadi salah satu kendala dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online.

b. Adanya kualitas kerja Aparatur Pemerintah/Pejabat Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan kepada petugas pengawas Transportasi Berbasis Online.

Kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rochani litiloly.,ST.,MT selaku Sekertaris di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa, 18 Februari 2020 yang menyatakan bahwa “ Dalam menilai suatu pekerjaan Pejabat Pemerintah selalu menilai sesuai dengan aturan akan tetapi kinerja yang dilakukan tidak bisa maksimal dikarenakan petugas tidak punya data berapa sebenarnya Transportasi berbasis Online yang ada di Sumatera Utara ini. Kemudian dikarenakan tidak ada data disebabkan pihak aplikasi transportasi berbasis Online belum bisa memberikan data-data sesuai dengan yang ada di data aplikasi.”

Selanjutnya hambatan-hambatan yang dialami Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online yaitu kurangnya pemahaman

para Drive Online dalam menyikapi Peraturan Menteri (Permen) No 118 tahun 2018, para Driver Online masih menganggap pemerintah hanya membela pengusaha transportasi berbasis Online sehingga ada beberapa Driver Online tidak mau bergabung dengan perusahaan dalam pengurusan Kartu Standar Pelayanan Elektronik padahal seperti yang diketahui bahwa di dalam Peraturan Menteri No 118 tahun 2018 bahwa transportasi berbasis Online wajib memiliki Kartu Standart Pelayanan Elektronik artinya mereka harus membuat kartu tersebut.

Kemudian Jawaban sama juga disampaikan oleh Bapak Rustam Efendi selaku Kepala Subbagian Umum di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, 20 Februari 2020 menyatakan “bahwa untuk menilai suatu pekerjaan Pejabat Pemerintah selalu menilai sesuai dengan aturan yang ada akan tetapi kinerja yang dilakukan belum maksimal dikarenakan petugas tidak punya data berapa sebenarnya Transportasi berbasis Online yang ada di Sumatera Utara ini. Kemudian dikarenakan tidak ada data disebabkan pihak aplikasi transportasi berbasis Online belum bisa memberikan data-data sesuai dengan yang ada di data aplikasi.”

Selanjutnya hambatan-hambatan yang dialami Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online yaitu masih banyak Driver Online yang tidak mau mengikuti aturan-aturan dan Standar pelayanan yang ada seperti memiliki Kartu Standar Pelayanan Elektronik karna hal tersebut wajib dan terdapat di dalam Peraturan Menteri No 118 tahun 2018 yang mana harus mereka ikuti.

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Darwin Purba,.MT selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan di Dinas Perhubungan Sumatera Utara pada hari Kamis 20 Februari 2020 menyatakan bahwa Dalam menilai suatu pekerjaan Pejabat Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dengan menyuruh para petugas pengawas transportasi berbasis Online selalu memberikan laporan yang berupa laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Ia menilai berdasarkan laporan jika laporan tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan maka bisa tidak naik pangkat.

Kemudian ada beberapa hambatan yang terjadi dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online seperti pihak petugas masih kuwalahan dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online di Kota Medan, salah satunya karena mereka tidak memiliki wewenang untuk menghentikan Driver Online liar yang beroperasi di Kota Medan. Dan kuota transportasi berbasis Online yang boleh beroperasi sekitar 3.500 unit namun kenyataannya yang beroperasi di jalan itu ada 100.000 unit.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai adanya kualitas kerja Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online belum sepenuhnya efektif dikarenakan masih banyak nya Driver Online liar yang beroperasi, mereka tidak mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri No 118 tahun 2018. Dimana mereka wajib memiliki Kartu Standar Pelayanan Elektronik.

c. Adanya Disiplin kerja yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah/Pejabat Pemerintah dalam menjalankan tugas pengawasan.

Disiplin kerja adalah suatu sikap patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Adanya disiplin kerja akan menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan kerja sehingga Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online dapat memperoleh hasil yang optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rochani litiloly.,ST.,MT selaku Sekertaris di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa, 18 Februari 2020 yang menyatakan bahwa sikap disiplin kerja yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan kepada petugas pengawas transportasi berbasis Online sudah cukup baik, dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kalau tidak pekerjaan tidak akan optimal. kemudian jika ada petugas pengawas transportasi Online yang tidak disiplin maka pejabat pemerintah memberikan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu di dalam Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun sanksi administratif yang di dapat oleh petugas pengawas transportasi Online jika tidak disiplin adalah penundaan kenaikan gaji secara berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dan lain sebagainya.

Selanjutnya pejabat pemerintah dalam memberikan arahan kepada para petugas pengawas transportasi berbasis Online selalu memberikan arahan dan contoh yang baik, arahan yang diberikan seperti agar para petugas tidak bersikap arogan kepada para Driver yang tidak mengikuti aturan tetap menanggapi dengan

baik/berlaku sopan dan pekerjaan harus sesuai dengan prosedur yang ada agar pengawasan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darwin Purba .,MT selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada Hari Kamis 20 Februari 2020 yang menyatakan bahwa sikap disiplin yang ditunjukkan oleh pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas seperti melakukan pengawasan transportasi berbasis Online sudah baik dengan selalu mengontrol laporan laporan yang ada dilapangan agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang akan mengganggu pengawasan tersebut.

Selanjutnya ketika memberikan arahan kepada para petugas pengawas transportasi berbasis Online selalu memberikan arahan-arahan yang dapat membangun semangat para petugas pengawas yang akan melakukan pengawasan dilapangan dan memberikan arahan bahwa pekerjaan harus sesuai dengan prosedur yang ada agar pengawasan berjalan dengan lancar.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Iswan Masyhur Hrp selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, 20 Februari 2020 menyatakan bahwa Disiplin kerja yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan kepada petugas pengawas transportasi berbasis Online sudah baik, karena kalau tidak disiplin maka Pejabat Pemerintah melanggar aturan yang berlaku yaitu di dalam Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. kemudian ada sanksi administratif yang di dapat yaitu penundaan kenaikan gaji secara berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan

pangkat setingkat lebih rendah, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dan lainnya.

Selanjutnya ketika memberikan arahan kepada para petugas pengawas transportasi berbasis Online Pejabat Pemerintah memberi arahan dengan mengadakan apel terbuka yang dihadiri oleh tim pengawas dengan memberikan saran dan nasihat-nasehat kepada mereka agar operasi berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang akan terjadi dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Adanya disiplin kerja Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online sudah cukup baik karena dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga hasil kerja yang dihasilkan akan bersifat efektif dan efisien.

d. Adanya prestasi kerja yang dicapai oleh Aparatur Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan kinerja kepada petugas pengawas.

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh pejabat pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online. biasanya prestasi kerja Pejabat Pemerintah itu dipengaruhi oleh kecakapan, ketelitian, keterampilan, pengalaman dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Umar Khayan.,SH selaku Kepala Seksi Bidang Perkeretaapian dan pengembangan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa, 18 Februari 2020 yang menyatakan bahwa hasil kerja Pejabat Pemerintah dilakukan sudah seoptimal mungkin dalam

melakukan pengawasan transportasi berbasis Online yaitu selalu bersikap tegas dan tidak memihak kepada siapapun, berusaha memupuk dan mengembangkan kerja sama dengan baik.

Kemudian jika berprestasi maka akan diusulkan kepada gubernur agar dinaikkan jabatannya. Hal yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah agar hasil kerja yang dilakukan mendapat hasil yang baik maka melakukan diklat kepada para petugas pengawas transportasi berbasis online.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Iswan Masyhur Hrp selaku Kepala Bidang Angkutan Jalan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, 20 Februari 2020 menyatakan bahwa prestasi kerja atau hasil kerja yang diberikan oleh Pejabat Pemerintah belum cukup baik dikarenakan Pejabat Pemerintah belum menguasai bidang tugasnya yaitu melakukan pengawasan transportasi berbasis Online. Hal tersebut karena transportasi berbasis Online baru saja muncul pada beberapa tahun belakangan ini.

Selanjutnya jika ada yang berprestasi pun tidak ada penghargaan yang diberikan karena bekerja berdasarkan tugas, pokok dan fungsi yang ada. Jika ada hanya pemberian tanda jasa saja oleh pihak pemerintah. Padahal pemberian penghargaan perlu juga dilakukan agar para petugas lebih bersemangat dan antusias dalam bekerja.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan mengenai prestasi kerja Pejabat Pemerintah belum sepenuhnya baik di karenakan Pejabat

Pemerintah belum menguasai bidang tugasnya yaitu melakukan pengawasan transportasi berbasis Online yang memang transportasi berbasis Online ini baru ada beberapa tahun belakangan ini. kemudian jika ada yang berprestasi tidak ada pemberian penghargaan tetapi hanya usulan kepada gubernur untuk kenaikan pangkat saja.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Akuntabilitas

Menurut Ihyaul Ulum (2010:40) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan suatu tanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi/instansi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya , melalui media pertanggung jawaban secara berkala. Maksudnya adalah kewajiban Pejabat Pemerintah untuk memberikan kinerja yang baik dalam melakukan pengawasan kepada petugas pengawas transportasi berbasis Online. Sehingga hasil yang didapat sesuai dengan yang di harapkan. Karena hal tersebut merupakan tujuan utama setiap individu atau kelompok untuk mencapai keberhasilan dalam proses pengawasan transportasi berbasis Online di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, tanggung jawab Pejabat Pemerintah adalah memberikan sarana dan prasarana seperti fasilitas itu sangat penting dan berpengaruh terhadap pengawasan transportasi berbasis Online. karena dengan adanya fasilitas yang memadai dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada para petugas pengawas transportasi berbasis Online dalam menjalankan tugasnya.

Tanggung jawab yang dilakukan Pejabat Pemerintah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan pasti ada, Hanya saja masih kurangnya koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait seperti Dirlantas Polri, Dishub Kabupaten/Kota, Medan, Deli Serdang, Binjai dan Jasa Raharja. Dikarenakan keberadaan instansi ini sangat penting dalam pengawasan Transportasi Berbasis Online, Namun pada kenyataannya beberapa instansi pemerintah diatas sama sekali tidak mempengaruhi pengawasan transportasi berbasis Online secara optimal. Mereka tidak saling menganggap bahwa instansi lainnya sangat penting dalam menjalankan pengawasan transportasi berbasis Online di Medan agar pengawasan tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Kurangnya komunikasi dan koordinasi menjadi salah satu kendala dalam pengawasan transportasi berbasis Online.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber, diketahui bahwa masih perlu adanya koordinasi yang baik yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah dengan instansi terkait dan peningkatan fasilitas yang memadai demi meningkatnya kualitas pengawasan transportasi berbasis Online.

4.2.2 Kualitas Kerja

Menurut Fuppo (2005:28) Kualitas kerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah dalam pencapaian tujuan. Karena pada dasarnya untuk melihat sampai sejauh mana peranan Pejabat Pemerintah dalam pengawasan transportasi berbasis Online, maka dapat dilihat dari hasil kerja seorang Pejabat Pemerintah

dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber yang ada di Dinas Perhubungan Sumatera Utara bahwa kualitas kerja Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online belum sepenuhnya efektif dikarenakan masih banyaknya Driver Online liar yang beroperasi, kuota yang diperbolehkan untuk beroperasi sebanyak 3500 kuota namun yg terlihat dilapangan sebanyak 100.000 kuota, kemudian mereka juga tidak mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri No 118 tahun 2018. Dimana mereka wajib memiliki Kartu Standar Pelayanan Elektronik.

4.2.3 Disiplin Kerja

Menurut Sastrohadiwiryo (2005:291) Disiplin kerja adalah suatu sikap patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online. Disiplin kerja yang dimiliki Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online sudah baik, dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kalau tidak pekerjaan tidak akan optimal. hanya saja ketika datang ke kantor terkadang tidak tepat waktu.

Kemudian dalam memberikan arahan kepada para petugas pengawas transportasi berbasis Online dengan mengadakan apel terbuka yang dihadiri oleh tim pengawas dengan memberikan saran dan nasihat-nasehat yang dapat

membangun semangat mereka untuk melakukan pengawasan agar operasi berjalan dengan lancar dan harus sesuai dengan prosedur yang ada.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber yang ada di Dinas Perhubungan Sumatera Utara bahwa Disiplin kerja Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online sudah cukup baik karena dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga hasil kerja yang dihasilkan akan bersifat efektif dan efisien. Kemudian selalu memberikan arahan-arahan yang bersifat membangun semangat para petugas pengawas transportasi berbasis Online dalam menjalankan tugas.

4.2.4 Prestasi Kerja

Menurut Hasibuan (2008:64) Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang yang dibebankan kepadanya. Prestasi Kerja merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap upaya suatu organisasi/instansi untuk mencapai tujuannya. Ketika prestasi kerja Pejabat Pemerintah baik dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online ini, maka hasil yang akan didapat pun sesuai dengan yang diharapkan.

Namun sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber, prestasi Kerja yang ditunjukkan oleh Pejabat Pemerintah belum sepenuhnya optimal dikarenakan Pejabat Pemerintah belum sepenuhnya menguasai bidang tugasnya yaitu melakukan pengawasan transportasi berbasis Online. hal tersebut karena transportasi berbasis Online baru saja muncul pada beberapa tahun belakangan ini. Jika berprestasi pun tidak ada penghargaan yang

diberikan karena bekerja berdasarkan tugas, pokok dan fungsi yang ada. Jika ada hanya pemberian tanda jasa saja oleh pihak pemerintah. Padahal pemberian penghargaan perlu juga dilakukan agar lebih bersemangat dan antusias dalam bekerja.

4.2.5 Tingkat Kinerja Pemimpin Aparatur Pemerintahan dalam pengawasan Transportasi Berbasis Online di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Kinerja kepemimpinan Aparatur Pemerintah/Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online adalah tata kelola Pejabat Pemerintah dalam proses pengawasan meliputi akuntabilitas. Hal ini menunjukkan agar Pejabat Pemerintah bisa lebih bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online. sehingga pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas berjalan semana mestinya. Masih kurangnya fasilitas yang diberikan oleh Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online kepada para petugas pengawas seperti mobil sosialisasi dan mobil penertiban. Seperti yang diketahui bahwa fasilitas merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung berlangsungnya proses pengawasan transportasi berbasis Online. apabila fasilitas tidak terdapat dalam pengawasan tersebut, maka kegiatan tersebut tidak akan tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Kemudian koordinasi dengan instansi terkait juga sangat perlu dilakukan seperti Dirlantas Polri, Dishub Kabupaten/Kota, Medan, Deli Serdang, Binjai dan

Jasa Raharja. Dikarenakan keberadaan instansi ini sangat penting dalam pengawasan Transportasi Berbasis Online, Namun beberapa instansi pemerintah diatas sama sekali tidak mempengaruhi pengawasan transportasi berbasis Online secara optimal. Mereka tidak saling menganggap bahwa instansi lainnya sangat penting dalam menjalankan pengawasan transportasi berbasis Online di Kota Medan agar pengawasan tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Kurangnya komunikasi dan koordinasi menjadi salah satu kendala dalam pengawasan transportasi berbasis Online.

Selanjutnya kualitas kerja juga diperlukan, adapun kualitas kerja Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online belum sepenuhnya efektif dikarenakan masih banyak nya Driver Online liar yang beroperasi, kuota yang diperbolehkan untuk beroperasi sebanyak 3500 kuota namun yg terlihat dilapangan sebanyak 100.000 kuota, kemudian mereka juga tidak mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri No 118 tahun 2018. Dimana mereka wajib memiliki Kartu Standar Pelayanan Elektronik.

Ketika menilai kinerja Kepemimpinan Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online dibutuhkan sikap disiplin kerja. Karena dengan adanya sikap disiplin berarti taat dan mengikuti aturan yang berlaku. Disiplin kerja Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online sudah cukup baik karena dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga hasil kerja yang dihasilkan akan bersifat efektif dan efisien. Kemudian selalu memberikan arahan-

arahan yang bersifat membangun semangat para petugas pengawas transportasi berbasis Online dalam menjalankan tugas.

Serta prestasi kerja sangat berpengaruh dalam menilai kinerja pejabat pemerintah dalam suatu organisasi/instansi untuk mencapai tujuannya. Ketika prestasi kerja Pejabat Pemerintah baik dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online ini, maka hasil yang akan didapat pun sesuai dengan yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang dilakukan, Tingkat Kinerja Pemimpin Aparatur Pemerintah/Pejabat Pemerintah dalam rangka Pengawasan Transportasi Berbasis Online di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya maksimal. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Sebagai instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengawasan transportasi berbasis Online di kota medan, binjai, dan deli serdang, peran kinerja Pemimpin Aparatur Pemerintah/Pejabat Pemerintah yang baik sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online.

Adapun bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pejabat pemerintah dalam melakukan pengawasan Transportasi Berbasis Online sudah sesuai yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang Peraturan Menteri (PERMEN) No 118 tahun 2018 yaitu tentang Angkutan Sewa Khusus, karena peraturan ini merupakan peraturan yang baru dikeluarkan kembali mengenai Transportasi berbasis Online setelah beberapa kali di ubah dan Pejabat Pemerintah tetap melakukan kontrol kepada para petugas pengawas transportasi berbasis Online lalu para petugas juga diberikan arahan untuk selalu memberi laporan yang ada dilapangan agar Pejabat Pemerintah tetap tahu hasil pekerjaan yang ada dilapangan.

Selanjutnya sarana seperti fasilitas untuk melakukan pengawasan transportasi berbasis Online sudah ada seperti mobil penertiban dan mobil sosialisasi tetapi masih kurang untuk menampung petugas yang akan melakukan pengawasan transportasi berbasis Online di lapangan. Hal ini dapat menghambat para petugas untuk melakukan pengawasan terhadap transportasi berbasis Online serta membuat hasil kerja yang dilakukan kurang maksimal. Dan jika melihat disiplin kerja Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online sudah cukup baik karena dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga hasil kerja yang dihasilkan akan bersifat efektif dan efisien.

Kemudian jika dilihat dari kualitas kerja Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online belum sepenuhnya efektif dikarenakan masih banyak nya Driver transportasi berbasis Online liar yang beroperasi, mereka tidak mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri No 118 tahun 2018. Dimana mereka wajib memiliki Kartu Standar Pelayanan Elektronik. Dan prestasi kerja Pejabat Pemerintah belum sepenuhnya baik di karenakan Pejabat Pemerintah belum menguasai bidang tugasnya yaitu melakukan pengawasan transportasi berbasis Online yang memang transportasi berbasis Online ini baru ada beberapa tahun belakangan ini. kemudian jika ada yang berprestasi tidak ada pemberian penghargaan tetapi hanya usulan kepada gubernur untuk kenaikan pangkat saja.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis terkait dengan Kinerja Kepemimpinan Aparatur Pemerintah dalam Pengawasan Transportasi Berbasis Online di Dinas Perhubungan Sumatera Utara, yaitu:

- a. Pejabat Pemerintah harus lebih bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan transportasi berbasis Online agar setiap proses pengawasan berjalan dengan maksimal. Kemudian harus lebih selektif untuk memecahkan masalah terutama dalam pengawasan transportasi berbasis Online khususnya dikota medan.
- b. Untuk fasilitas, diharapkan kepada Aparatur Pemerintah/Pejabat Pemerintah agar memberikan fasilitas yang memadai untuk melakukan pengawasan transportasi berbasis Online. karena fasilitas itu sangat penting dan berpengaruh terhadap pengawasan transportasi berbasis Online. karena dengan adanya fasilitas yang memadai dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada para petugas pengawas transportasi berbasis Online dalam menjalankan tugasnya.
- c. Begitu juga dengan koordinasi , Pejabat Pemerintah harus lebih meningkatkan komunikasi dengan baik dengan instansi-instansi terkait agar dalam menjalankan program tidak tumpang tindih, sehingga akhirnya upaya dalam pengawasan transportasi berbasis Online di Kota Medan terlaksana dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Adisasmita, 2015. *Analisis Kebutuhan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Husman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiadi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, Melayu S.P., 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Iskandar. 2008. *metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Kadarisman, Muh. 2018. *Manajemen Aparatus Sipil Negara*. Depok: Rajawali Pers
- Kartono. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan. Apakah Kepemimpinan Abnormal itu*. Jakarta: Rajawali Persada
- Moehariono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Moleong, Lexy. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail .2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja: proses terbentuk, tumbuh kembang, Dinamika dan Kinerja Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Rivai V, Mulyadi D. 2011. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Subrata, Sumandi. 2015. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sujamto. 1986. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika

Tambunan,Toman. 2015. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Wijaya,Andika. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014

Undang –undang Nomor 9 tahun 2010 pasal 1

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

DOKUMENTASI





UIN
Universitas Islam
Negeri
Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Slk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Politik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 29 November 2019.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : KHIMALA MUFLIHANA
N P M : 16031000041
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,54

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

1	Kinerja Kepemimpinan Aparatur Pemerintah dalam Pengawasan Transportasi Berbasis Online di Dinas Perhubungan di Kota Medan	Ad
2	Human Governance dalam Kualitas Pelayanan Administrasi kependudukan pada kantor Camat di Kec. Kp. Rakyat	
3	Pengaruh Pengawasan Kepala Puskesmas terhadap sikap kerja Pegawai di Puskesmas Desa Tj. Medan kec. Kp. Rakyat	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 29 November 2019


NALIL KHARIRAH, S.IP M.Pd

Pemohon,


(Khimala Muflihana.....)
Pembimbing



Beberapa tahun yang lalu, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 9624507 - (061) 9815450 Ext. 200-201 Fax. (061) 9625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.003/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 29 November 2019 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut

Nama mahasiswa : **KHUMALA MUFLIHANA**
 N P M : 1603100041
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020
 Judul Skripsi : **KINERJA KEPEMIMPINAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN**
 Pembimbing : **Dr. R. KUSNADI, M.AP**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 29 November 2020.

Ditetapkan di Medan,
 Medan, 20 Jumadil Awal 1441 H
 16 Januari 2020 M


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 30 Desember 2019.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : KHUMALA MUELIHANA
N P M : 1603100091
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti **Seminar Proposal Skripsi** yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 003/SK/IL3/UMSU-03/F/2019... tanggal 30 Desember... dengan judul sebagai berikut :

KINERJA KEPEMIMPINAN APARATUR PEMERINTAH DALAM
PENGAWASAN TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DI DINAS
PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
Pembimbing

Dr. R. LITONARY, M. AD

Pemohon,

KHUMALA MUELIHANA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

54-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 244/JUNDIR.3-AUI/UMSU-03/IF/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020
Waktu : 07.30 s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pustaka Mahasiswa	TIM PENGLUJI			Judul Skripsi
			PENGLUJI I	PENGLUJI II	PENGLUJI III	
1	DHEA QUSWATHA RIANTI	160310027	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Drs. BANGUN NAPTUPULLI, M.Si	Drs. R. KURNADI, M.AP	PENGARUH PENGAWASAN MELIKAT TERHADAP KINERJA APARATUR DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI DINAS KOVRESI UMMI KOTA MEDAN
2	ANANDA MUFLIHUKA	160310041	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Drs. BANGUN NAPTUPULLI, M.Si	Drs. R. KURNADI, M.AP	KINERJA KEPEMIMPINAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
3	JANI ANING	160310066	Drs. R. KURNADI, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.Si	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2002 DALAM RANGKA PENGELOLAAN ZON PELAYANAN PABRIK DI KOTA MEDAN
4	FITRI RAMADANI LUIS	160310038	Drs. R. KURNADI, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.Si	Drs. BANGUN NAPTUPULLI, M.Si	PENGARUH PENGAWASAN ATAS LANGSUNG TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEDAGANG DI UPT WILAYAH IV BACHAN PENGELOLAAN PALAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEC. MEDAN BARAT DAN KEC. MEDAN TIRUR
5	IZMA PUTRI ELISVA PASKARIBU	160310002	NALLE KHARISAH, S.IP, M.Pd	MUHAMMAD, S.Sos., M.Si	Drs. BANGUN NAPTUPULLI, M.Si	TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PRIORITAS PENGUNTAHAN DAUA DESA DI DESA PONDOK GALAH KAB. BENER MERIAH

Modeli Baku Di 13.30

Medan, 12 Maret 2020
07 Maret 2020 M



Dr. Arifny/Salihin, S.Sos., M.Si



Dr. Zulfitriani, M.Ts.Kom

Panitia Ujian

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Perihal : **Permohonan Perubahan Judul Skripsi**

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : KHUMALA MUFLIHANA
NPM : 1603100041
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan perubahan judul skripsi, sebagai berikut :

Kinerja Kepemimpinan Aparatur Pemerintah dalam Pengawasan Transportasi
Berbasis Online di Dinas Perhubungan di Kota Medan

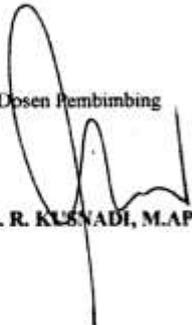
Menjadi:

Kinerja Kepemimpinan Aparatur Pemerintah dalam Pengawasan Transportasi
Berbasis Online di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya.
Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 10 Januari 2020

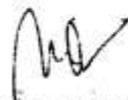
Dosen Pembimbing


(Drs. R. KUSNADI, M.AP)

Hormat Pemohon,


(KHUMALA MUFLIHANA)

Ketua Jurusan


(NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd)



Sebagai UIN dan UIN
 dan memiliki salah satu institusi
 yang berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 9624567 - (061) 9610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 9623474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 10.003/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 29 November 2019 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut

Nama mahasiswa : **KHUMALA MUFLIHANA**
 N P M : 1603100041
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020
 Judul Skripsi : **KINERJA KEPEMIMPINAN APARATUR PEMERINTAH DALAM
 PENGAWASAN TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DI DINAS
 PERHUBUNGAN KOTA MEDAN**
 Pembimbing : Drs. R. KUSNADI, M AP

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 29 November 2020.

Ditetapkan di Medan,
 Medan, 20 Jumadil Awal 1441 H
 16 Januari 2020 M

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



Unggul, Cerdas & Berprestasi
 Kita membangun negeri ini agar lebih maju, adil, dan sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muhtar: Bani No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624987 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6629474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **Khairani Muflihah**
 N P M : **1603100041**
 Jurusan : **Ilmu Administrasi Publik**
 Judul Skripsi : **Kinerja Kepemimpinan Aparatur Pemerintah Dalam Pengawasan Transparansi Berbasis Online di Dinas Pertubuhan Provinsi Sumatera Utara**

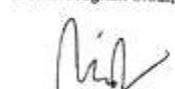
No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10/01-2020	Sempurnakan Proposal akhir dan seminar dan kerangka awal / Buat Bab I, S/II	  
2.	15/01-2020	- perbaiki teknik penulisan skripsi (kegiatan skripsi dalam tahun 2016 tentang Peraturan penulisan skripsi) - selesai kembali bimbingan selanjutnya.	
3.	21/01-2020	- Sempurnakan kembali uraian pada Bab II (Garis teori) terutama tentang cara penulisan	
4.	28/01-2020	- Sempurnakan kembali uraian pada Bab III terutama uraian subbabnya, selanjutnya buat draft wawancara (pertanyaan berpetemuan pada kompetensi)	
5.	3/02-2020	- perbaiki kembali draft wawancara selanjutnya dapat redaraskan penelitian petokali	
6.	18/02-2020	- Sempurnakan Draft Lokasi Penelitian dan Perbaiki uraian pada Bab IV tentang hasil wawancara	
7.	25/02-2020	- Sempurnakan pembahasan dan perbaiki simpulan pada Bab V	
8.	5/03-2020	- Acc skripsi untuk ujian skripsi	

Medan, Maret 2020

Dekan,


 (Dr. Arfan, S.Pd., M.Pd.)

Ketua Program Studi,


 (Nuzi Khairah, S.Pd., M.Pd.)

Pembimbing ke :


 (Drs. R. Kurniasih, M.A.P.)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 009/KEP/II.3-A/UMSU-03/1/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Hari, Tanggal : Jum'at, 10 Januari 2020
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Nalli Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	FITRI RAMADANI LUBIS	1603100036	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	Drs. H. BANGUN HARITUPULU, M.S	PENGARUH PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG TERHADAP KINEJ PEGAWAI DI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN KONTRIBUSI DAERAH MEDAN
2	RATHI PERMATA SARI KOMBING	1603100006	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	AKUNTABILITAS KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM BAYATUAN STIMA PERUMAHAN SWADAYA (RSPS) DI DINAS PEKERJAAN LUMAJUNG (PJ) MEDAN
3	DARATHUL LAILA	1603100040	Drs. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN TERHADAP PRESTASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATUBARA
4	KHUMALA MUFLIHANA	1603100041	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	KINERJA KEPEMIMPINAN APARATUR PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN TRANSPORTAS BERBASIS ONLINE DI DINAS PERHUBUNGAN DI KABUPATEN MEDAN
5	IZKA PUTRI ELISMA PASARIBU	1603100092	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP	Drs. H. BANGUN HARITUPULU, M.S	TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PRIORITAS PENGGUNAAN (KINERJA) DESA DI DESA PONDOK GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH

Medan, 12 Januari 2020
09 Januari 2020 M



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khumala Muflihana

NPM : 1503100041

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Tingkat Kinerja Pemimpin Aparatur Pemerintahan Dalam Rangka Pengawasan Transportasi Berbasis Online di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Menyatakan bahwa dalam proses pembuatan skripsi ini saya tidak menggunakan riset dari fakultas, sebab skripsi yang saya buat tidak menggunakan tempat riset yang resmi dan penelitian ini bersifat kualitatif.

Demikian pernyataan yang saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Medan, 18 Juni 2020

Hormat Saya,



Khumala Muflihana

Diketahui,
Pembimbing



(Drs. R. Kusnadi, M.AP)

Disetujui,
Ketua Program Studi



(Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Khumala Muffihana
Tempat dan Tanggal Lahir : Duri, 23 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Padang Bulan, Desa Tanjung Medan
Kec.Kampung Rakyat, Kab.Labuhan Batu Selatan

Nama Orang Tua

Ayah : Hamler Siregar
Ibu : Supiani
Alamat : Jl.Padang Bulan, Desa Tanjung Medan
Kec.Kampung Rakyat, Kab.Labuhan Batu Selatan

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 112244 Tanjung Medan tahun 2010
 2. MTS PPII Kampung Rakyat 2013
 3. SMA Negeri 1 Kampung Rakyat
 4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara Tahun 2020
-



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 – 4557009 – 4527480
 Fax. (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070-*292* /BKB.P/II/2020

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
2. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 117/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal 07 Pebruari 2020 Perihal Rekomendasi penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

a. Nama	: Khumala Muflihana
b. Alamat	: Medan
c. Pekerjaan	: Mahasiswa
d. Nip/Nim/KTP	: 1603100041
e. Judul	: Kinerja Kepemimpinan Aparatur Pemerintah Dalam Pengawasan Transportasi Berbasis Online di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
f. Lokasi/ Daerah	: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
g. Lamanya	: 3 (tiga) bulan
h. Peserta	: Sendiri
i. Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan :
 - a. Untuk pengawasan surat ijin yang dikeluarkan oleh Balitbang Provinsi kami diberi tembusannya.
 - b. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud dan yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
 - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara.
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Rekomendasi ini tidak berlaku.
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan ijin Penelitian.

Medan, 13 Februari 2020

Ari. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA
 KABID PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

BUDIANTO TAMBUNAN, SE, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUJDA
 NIP. 19640526 199803 1 002

Tembusan:

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
3. Ka. Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Peninggal

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Kinerja Kepemimpinan Aparatur Pemerintah dalam Pengawasan
Transportasi Berbasis Online Di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera
Utara

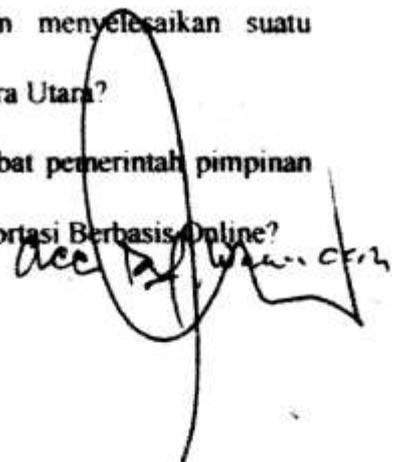
A. Keadaan Narasumber

1. Identitas Narasumber :
2. Jabatan Eselon :
3. Pangkat Golongan/Ruang :
4. Usia/umur :

B. Pertanyaan Wawancara Per kategorisasi:

a) **Adanya laporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah /Pejabat Pemerintah melaksanakan Pengawasan Pejabat Pengawas di Dinas Perhubungan**

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan Transportasi Berbasis Online di Dinas Perhubungan?
2. Bagaimana kinerja Pejabat Pemerintah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
3. Ketika melakukan pengawasan, Bagaimana pejabat pemerintah pimpinan menilai kinerja pejabat/petugas pengawas Transportasi Berbasis Online?

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'aca', is written over the text of question 3. To the right of the signature, the initials 'CF12' are written.

2. Apakah ada sanksi administratif yang diberikan kepada Pejabat Pengawas apabila tidak disiplin dalam melakukan pengawasan? Jika ada, apa saja sanksi-sanksi tersebut.
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Apakah Pejabat Pemerintah menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan?
 4. Bagaimana pejabat pemerintah memberikan arahan dalam pekerjaan kepada petugas pengawas Transportasi Berbasis Online?
- d) Adanya Prestasi Kerja yang dicapai oleh Aparatur Pemerintah/Pejabat Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan kinerja pejabat pengawas .**
1. Bagaimana upaya yang dilakukan Pejabat Pemerintah untuk meningkatkan prestasi kerja petugas/pejabat pengawas?
 2. Bagaimana pemberian penghargaan yang diberikan Dinas Perhubungan kepada Pejabat Pemerintah yang berprestasi?
 3. Bagaimana cara Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara memberikan kesempatan kepada Pejabat Pemerintah untuk meningkatkan prestasi kerja?
 4. Apakah hasil kerja Pejabat Pemerintah sudah bisa mendukung prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas?

4. Bagaimana sistem atau proses pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap petugas Pengawas Transportasi Berbasis Online?

b) Adanya Kualitas Kerja Aparatur Pemerintah/ Pejabat dalam melaksanakan Pengawasan Pejabat Pengawas.

1. Bagaimana Pejabat Pemerintah menilai kualitas/kinerja dalam melakukan pengawasan Transportasi Berbasis Online di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dialami Pejabat Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap petugas pengawas Transportasi Berbasis Online?
3. Bagaimana cara Dinas Perhubungan dalam melakukan penilaian kinerja pada Pejabat Pemerintah?
4. Kriteria apa saja yang ditetapkan dalam menilai kinerja para Pejabat Pemerintah saat ini?

c) Adanya Disiplin Kerja yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah/Pejabat Pemerintah dalam menjalankan tugas Pengawasan.

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Pejabat Pemerintah jika ada Petugas/Pejabat pengawas yang tidak disiplin dalam melakukan pengawasan?